

Daftar Pustaka

Buku

- Arto, Mukti. 2004. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ashari, A. 2017. *Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana*, Makassar: Al-Hikam.
- Bakhri, Syaiful. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2007. *Kemahiran dan Ketrampilan Praktek Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publishing.
- _____. 2016. *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pt Grafindo Persada.
- D, Schaffmeiste, dkk. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Effendy, Marwan. 2012. *Sistem Peradilan Pidana: Tinjauan terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana*. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____. 2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Yahya, M. 2001. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- _____. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, serta Peninjauan Kembali (Jilid 2)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ibrahim, Johnny. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, Cetakan ke-1.
- Kristiana, Yudi. 2016. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Perspektif Hukum Progresif)*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Lamintang, P.A.F. 2008. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.
- Makarao, Taufik dan Suhasril, 2010. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marpaung, Ledeng. 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana Edisi ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marzuki, Mahmud, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mas, Marwan. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mifathul Fikri, Fiyan. 2011. *Penggunaan keterangan terdakwa dalam persidangan pidana*. Yogyakarta.
- Moeljatno, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 212-221
- Mulyadi, Lilik. 2020. *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____. 2007. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*, Bandung: Mandar Maju. hal 127.
- _____. 2014. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- O.S Hiariej, Eddy. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Samosir, C. Djisman. 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soesilo, R, 1982. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi penegak Hukum)*. Bogor: Politeia.
- Winano, Surachmad. 2004. *Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: CV Tarsito.

Artikel Jurnal

- Alamri, Hadi. 2017. *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lex Privatum Vol. V/No. 1
- Alkostar, Artidjo. 2006. *Mencandra Hakim Agung Progresif dan Peran Komisi Yudisial*, Buletin Komisi Yudisial, Vol. 1.
- Dianti, Flora. *Bentuk-bentuk Tindak Pidana Korupsi*, 2020. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e6247a037c3a/bentuk-bentuk-tindak-pidana-korupsi/>
- Hassanah, Hetty, 2011, *Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Majalah Ilmiah UNIKOM; Vol. 8 No. 2
- Irwan, Asri, Muh. "Opini: Putusan Ultra Petita Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi". Diakses di <http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/833>
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta, 2015, hlm. 79. <https://kpk.go.id/gratifikasi/BP/PedomanPengendalianGratifikasi.pdf>.
- Lokas, Richard. 2015. *Barang Bukti Dan Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lex et Societatis*, Vol. III/No. 9/Okt/2015.

- Pelafu, Fiona L. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Lex Crimen* Vol. VI/No. 3/Mei/2017.
- Rozi, Fachrul. 2015. *Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Yuridis Unaja Vol 1 No 2.
- Topan, Rendra, 2019. “Unsur-unsur Gratifikasi”.
<https://rendratopan.com/2019/05/10/unsur-unsur-gratifikasi/>,
- Umboh, Jeheskiel, Prisco, 2013, *Fungsi Dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan Dalam Proses Perkara pidana*, Lex Crimen Vol. II No. 2, hlm. 120.
- Wahyudi, Johan, 2012, *Dokumen elektronik sebagai Alat Bukti pada Pembuktian di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol. XVII, No. 2 Tahun 2012, Edisi Mei.
- Yasin, Muhammad, S.H, M.H, 2017. “*Batasan Ultra Petita dalam Putusan Perkara Pidana*”.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)